

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan informasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah untuk pertumbuhan jumlah penerimaan dari PAD selalu meningkat selama periode 2012-2016, dimana Pemda memperoleh kontribusi yang cukup besar dari Lain-lain PAD yang Sah. Adanya penerimaan baru dari BLU RSUD dan Dana Kapitasi JKN di puskesmas membuat penerimaan Lain-lain PAD yang Sah meningkat signifikan. Pertumbuhan rata-rata untuk PAD mencapai angka 28,53%.

Sedangkan untuk jumlah penerimaan Dana Perimbangan mengalami peningkatan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, dimana pemerintah pusat memberikan suntikan dana yang besar untuk terlaksananya pembangunan daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara umum jumlah penerimaan selalu meningkat dari tahun 2012-2015, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan lebih dari 100% dari jumlah penerimaan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan pertumbuhan rata-rata menjadi minus 2,29%.

2. Analisis berdasarkan tingkat pertumbuhan penerimaan dari Pendapatan Daerah secara umum dalam klasifikasi tingkat pertumbuhan yang baik.

Analisis Komponen Pendapatan Daerah yaitu PAD, laju pertumbuhan PAD setiap tahun mengalami penurunan selama tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam mengumpulkan pendapatan asli daerahnya sehingga pemerintah daerah membutuhkan strategi tertentu agar PAD yang diterima lebih maksimal. Berdasarkan analisis laju pertumbuhan untuk Dana Perimbangan selama tahun 2012-2015 mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah penerimaan yang cukup signifikan sehingga tingkat pertumbuhannya juga kembali meningkat. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2012-2016 mengalami fase tingkat pertumbuhan yang naik turun, dimana laju pertumbuhan 2015-2016 sebesar minus 59,74%. Pemerintah daerah perlu memperhatikan sumber penerimaan selain PAD karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah tidak cukup hanya dari PAD saja.

### 3. Analisis Kontribusi Penerimaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan data tahun 2012-2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2012 kontribusi PAD terhadap total Pendapatan sebesar 3,28 %, tahun 2013 sebesar 3,72 %, tahun sebesar 2014 5,26 %, tahun 2015 sebesar 5,53%, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,77%. Dana perimbangan merupakan kontributor utama atas pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana kontribusinya cenderung menurun dari tahun 2012-2015, namun tahun 2016 kontribusi untuk dana perimbangan

meningkat kembali. Kontribusi Dana perimbangan tersebut tahun 2012 sebesar 82,17%, tahun 2013 sebesar 79,86%, tahun 2014 sebesar 77,75%, tahun 2015 sebesar 72,48%, dan tahun 2016 sebesar 85,68%. Sementara kontribusi dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2012-2015 juga cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2016 kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan. Kontribusi Lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut tahun 2012 sebesar 14,55%, tahun 2013 sebesar 16,42%, tahun 2014 sebesar 16,99%, tahun 2015 sebesar 21,99%, dan tahun 2016 sebesar 8,54%.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari berbagai faktor, antara lain:

1. Periode penelitian ini hanya terbatas untuk tahun 2012-2016.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kota di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Penelitian ini hanya berfokus menganalisis terkait pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penulisan ini, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

- a. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus gigih dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui eksplorasi potensi-potensi daerah dan pengembangan potensi daerah baik dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:
  - b. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta penyetoran.
  - c. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan, dan lainnya.
  - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan PAD oleh aparatur.
  - e. Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapatkan informasi tentang jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.
  - f. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat meningkatkan kinerjanya hendaknya tidak hanya berfokus dalam meningkatkan PAD saja dengan
  - g. Penetapan tarif pajak atau retribusi yang dapat membebaskan masyarakat. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan investasi dengan memberikan insentif bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya ke

Kabupaten Lima Puluh Kota seperti dengan memberikan keamanan dalam berinvestasi, bunga yang lebih tinggi, dan sebagainya. Dengan meningkatnya investasi maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana jika pertumbuhan ekonomi meningkat PAD juga dapat meningkat.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian agar analisis terhadap kinerja pemerintah mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperluas analisis pertumbuhan dan kontribusi mengenai belanja daerah serta pembiayaan.

